

Judul : Pemerintah dan masyarakat sipil satukan data
Tanggal : Rabu, 29 Desember 2021
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 5

KOMPAS, RABU, 29 DESEMBER 2021

KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN

Pemerintah dan Masyarakat Sipil Satukan Data

JAKARTA, KOMPAS — Pendokumentasian penanganan kasus kekerasan terhadap Perempuan di Indonesia dalam lima tahun terakhir mengalami kemajuan signifikan. Namun, sistem yang dikembangkan masih berdiri sendiri-sendiri di setiap lembaga.

Selama dua tahun terakhir, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kementerian PPPA), Komisi Nasional Antikekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), dan Forum Pengada Layanan (FPL) bagi Perempuan Korban Kekerasan bersinergi untuk menyatukan data dan laporan bersama dari pendokumentasian kasus kekerasan terhadap perempuan.

Meskipun masih menghadapi sejumlah kendala, upaya

penyatuan data yang dilakukan ketiga lembaga tersebut akhirnya mulai terwujud. Data kondisi kekerasan terhadap perempuan sepanjang Januari hingga Juni 2021 diluncurkan Selasa (28/12/2021).

Dalam kegiatan bertajuk "Gerak Bersama dalam Data: Laporan Sinergi Database Kekerasan terhadap Perempuan Tiga Lembaga" ini, Sekretaris Kementerian PPPA Pribudiarta Nur Sitepu menegaskan sinergi data kekerasan menjadi penting untuk dilakukan sebagai implementasi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 39 Tahun 2020.

"Banyak sekali manfaat dari sinergi data kekerasan ini, seperti diperolehnya data yang terpadu, mudah diakses dan di-

cara terintegrasi dan berkelanjutan," ujar Pribudiarta pada acara yang juga dihadiri Ketua Komnas Perempuan Andy Yentriyani dan Koordinator Sekretariat Nasional FPL Veni Siragar.

Berdiri sendiri-sendiri

Pribudiarta menegaskan, sinergi data kekerasan terhadap perempuan penting dilakukan karena banyaknya sistem pendokumentasian kasus kekerasan yang dikembangkan berbagai pihak tetapi masih berdiri sendiri-sendiri. Hal ini menyebabkan penghitungan ganda atau tumpang tindih penyikapan dikarenakan basis data yang belum tersinergikan.

Selama ini data kekerasan terhadap perempuan dihimpun pemerintah melalui Kement-

rian PPPA melalui Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni PPA), Komnas Perempuan mengembangkan sistem basis data Sintaspuan, dan FPL memakai Titian Perempuan.

Kendati sudah ada pendataan, penyatuan data itu masih menghadapi tantangan. Selain penggunaan istilah dan kategorisasi yang berbeda antar lembaga, penghitungan ganda masih menjadi persoalan.

"Ini dikarenakan belum terintegrasinya sistem pendokumentasian kekerasan terhadap perempuan secara utuh di antara ketiga lembaga sehingga sangat memungkinkan korban melapor kasusnya ke lebih dari satu lembaga," ujar Ketua Subkom Pemantauan Komnas Perempuan Dewi Kanti. (SON)